

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021-2023

Anita Rahmah Hidayah<sup>1</sup> ; Neks Triani<sup>2</sup>; Arnadi Chairunnas<sup>3</sup>

Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Jln. Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara  
E-mail : [anitarahmah300@gmail.com](mailto:anitarahmah300@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to analyze the financial performance of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Kolaka Regency during the 2021–2023 period. The research adopts a quantitative descriptive approach, utilizing secondary data in the form of regional revenue budget realization reports obtained from Bapenda Kolaka Regency. The findings indicate that the region's financial independence remains within a low to moderate category, reflecting a high dependency on from the central government. The effectiveness ratio of Regional Original Revenue (PAD) shows a relatively favorable trend transfers, particularly in 2022, when PAD realization exceeded the predetermined target. However, this performance declined again in 2023. Furthermore, the growth ratio suggests that the region's capacity to enhance financial performance has been inconsistent from year to year. These results highlight the necessity for Bapenda Kolaka Regency to optimize and diversify existing revenue streams. Additionally, improving the efficiency and effectiveness of regional financial management should be a critical focus

**Keywords:** *Financial performance, independence ratio, effectiveness ratio, growth ratio, local revenue, Bapenda Kolaka*

Performa keuangan daerah dipakai sebagai acuan ukur guna menilai seberapa efektif pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi, yang dikaitkan dengan pusat pertanggung jawaban tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja dipahami sebagai hasil yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran serta mutu dan jumlah output yang dapat diukur secara objektif. Sementara itu, Sari (2016) menyebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran yang diukur melalui perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah dengan target yang telah ditetapkan, sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan yang diatur dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah bertujuan utama untuk menyajikan informasi keuangan

kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Data keuangan ini menjadi landasan penting dalam proses pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan urusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pemerintah daerah yang mampu menghasilkan laporan keuangan berkualitas akan dapat menyampaikan informasi keuangan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terhindar dari praktik penyimpangan dalam pelaporannya. Salah satu indikator bahwa laporan keuangan tersebut dianggap berkualitas adalah apabila mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana dikemukakan oleh Rachmawati R. (2003).

Keuangan daerah merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah, yang seluruhnya dapat dinilai dalam satuan uang. Keuangan daerah juga mencakup seluruh bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan di daerah akan berjalan secara optimal jika diiringi oleh penerimaan pendapatan yang memadai. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, sesuai dengan prinsip *money follow program* serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Menurut Tumija dan Sinta (2022), kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai bobot keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai hasil kerja di bidang pengelolaan keuangan, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran tertentu. Selanjutnya, Insani et al. (2023) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah berfungsi sebagai indikator penting yang digunakan untuk memantau, mengukur, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengurusan keuangandaerah.

### Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Analisis performa keuangan pemerintah daerah merupakan suatu proses evaluatif yang bertujuan menilai capaian kinerja keuangan melalui telaah terhadap laporan keuangan daerah. Proses analisis ini dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan pada periode sebelumnya, sekaligus untuk mengidentifikasi potensi kinerja di periode yang akan datang. Dalam proses tersebut, digunakan beberapa rasio keuangan sebagai alat ukur utama, antara lain:

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$RKKD = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman}} \times$$

**Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Siktania Maria Dilliana & Henrikus Herdi, 2022:25-26)

#### Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : 40%

#### Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}}$$

Keterangan:

- t1 = tahun awal
- t0 = tahun akhir

**Tabel 2 kriteria kinerja keuangan rasio pertumbuhan**

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60 %	Tidak efektif

Sumber: Saifrizal, 2022

### METODE

Studi ini dikerjakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang berlokasi di Jalan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yakni dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan jenis data yang dikaji berupa data sekunder. Jenis studi yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sulistyawati, Wahyudi, dan Trimuryono (2022) dalam Nurhabiba et al. (2023), penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan suatu objek secara apa adanya. Penelitian ini berfokus pada penarikan kesimpulan berdasarkan fenomena yang dapat diamati melalui data numerik, serta tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Tujuan utama dari studi ini yakni guna mengetahui kinerja keuangandaerah. Sumber data yang dipakai yakni data primer dan data sekunder. Sementara itu, teknik kajian yang dipakai

dalam studi ini mencakup tiga jenis rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio pertumbuhan.

## HASIL

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

RKKD tahun anggaran 2021

$$= \frac{122.696.856.082,32}{1.148.676.998.393,00} = 10,6\%$$

RKKD tahun anggaran 2022

$$= \frac{170.930.087.482,76}{1.130.986.758.245,00} = 15\%$$

RKKD tahun anggaran 2023

$$= \frac{172.442.807.531,16}{1.163.550.566.206,00} = 14,8\%$$

### Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas

PAD tahun anggaran 2021

$$= \frac{122.696.856.082,32}{144.082.644.411,00} = 85\%$$

Rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2022

$$= \frac{170.930.087.482,76}{164.833.343.446,00} = 103\%$$

Rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2023

$$= \frac{172.442.807.531,16}{185.646.434.539,00} = 92\%$$

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan 2021

$$= \frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}} = \frac{122.696.856.082,32 - 172.442.807.531,16}{172.442.807.531,16} = -28\%$$

Rasio pertumbuhan 2022

$$= \frac{PAD_{t2} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}} = \frac{170.930.087.482,76 - 172.442.807.531,00}{172.442.807.531,00} = -8\%$$

Rasio pertumbuhan 2023

$$= \frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}} = \frac{172.442.807.531,16 - 122.696.856.082,32}{122.696.856.082,32} = 40\%$$

## PEMBAHASAN

Hasil studi memperlihatkan bahwa

tingkat kemandirian keuangan di Pemerintah Kabupaten Kolaka masih berada pada kategori sangat rendah, dengan persentase kurang dari 25%.

Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri masih lemah, sehingga ketergantungan kepada dana transfer dari pemerintah pusat cukup besar. Tingginya tingkat ketergantungan ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan. Jadi karena itu, peningkatan rasio kemandirian dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan PAD, seperti melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pemanfaatan kekayaan daerah yang dikelola secara efisien.

Selanjutnya, hasil analisis rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa pada tahun 2021, efektivitas PAD masih tergolong kurang efektif karena nilainya berada di bawah 89%. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dan dikategorikan sangat efektif karena nilai efektivitasnya melebihi 100%. Sementara itu, pada tahun 2023 efektivitas PAD menurun dan diklasifikasikan cukup efektif karena nilainya berada di bawah 99%. Secara umum, kinerja keuangan daerah dalam merealisasikan PAD tergolong baik, terutama pada tahun 2022. Meskipun demikian, untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka perlu terus mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Dibutuhkan strategi yang inovatif serta kapasitas kelembagaan yang kuat agar PAD dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Adapun hasil analisis terhadap rasio pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa pada tiga tahun berturut-turut, yakni tahun 2021, 2022, dan 2023, pertumbuhan PAD berada dalam kategori tidak efektif karena masing-masing berada di bawah 60%. Hal ini menandakan bahwa kemampuan Bapenda dalam mempertahankan tren

peningkatan PAD dari tahun ke tahun masih belum konsisten dan memerlukan perhatian lebih, baik dari segi perencanaan strategi maupun pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil olahan data penelitian ini, dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka selama periode 2021 hingga 2023 masih berada dalam kategori sangat rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya pola hubungan instruktif, di mana andil pemerintah pusat jauh lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi.

### 2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka guna mewujudkan target pendapatan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, nilai efektivitas PAD berada di bawah 89%, sehingga diklasifikasikan dalam kategori kurang efektif. Kemudian pada tahun 2022, capaian efektivitas meningkat signifikan hingga melampaui 100%, yang menempatkannya dalam kategori sangat efektif. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan dengan tingkat efektivitas berada di bawah 99%, sehingga dikategorikan sebagai cukup efektif.

### 3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka guna mengembangkan kinerja keuangan setiap tahun. Menurut hasil analisis, kondisi keuangan pada tahun 2021 hingga 2023 dikategorikan tidak efektif, karena persentase pertumbuhan berada di bawah ambang batas 60%. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio pertumbuhan tercatat sebesar -28% dan -8%, yang menunjukkan terjadinya penurunan kinerja keuangan secara negatif. Sementara

itu, pada tahun 2023, rasio pertumbuhan meningkat menjadi 40%.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dilliana, Siktiana Maria S.Akun., K.Si., A., & Herdi, Hendrikus, S.E., M. S. . (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Eureka Media Aksara.
- Insani, A., Rahayu, S., & Misni Erwati. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V6i1.343>
- Nurhabiba, F. D., Misdalina, M., & Tanzimah. (2023). Kemampuan Higher Order Thinking Skill (Hots) Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Sd 19 Palembang. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Fkip Universitas Mandiri*, 09, 119–121.
- Rahman, W. A. (2021). *Winia aulia rahman 175310599*.
- Saifrizal, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Di Kabupaten Bireuen. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(3), 1–23.
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jekp: (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9, 61–78.